

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan

1. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian seseorang atau kelompok agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan tidak sekadar memberikan bantuan, melainkan lebih kepada upaya peningkatan kapasitas masyarakat supaya mampu mengelola potensi yang ada pada dirinya. Dalam proses ini, masyarakat didorong untuk aktif mengambil keputusan dan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sosial.¹⁹ Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan untuk menentukan arah perkembangan kehidupan sosialnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pembangunan yang menetapkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam peningkatan kesejahteraan hidup.²⁰ Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga harus berperan aktif agar program yang

¹⁹ Edi Suharto, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Dan Aplikasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 59.

²⁰ Mardikanto and Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*.

ada dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan sosial.²¹ Pemberdayaan juga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar dapat mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan berkelanjutan.²²

Jadi, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar proses pemberian bantuan, melainkan sebuah upaya yang bersifat membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat secara menyeluruh agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial.

2. Peran Pemberdayaan

Peran dalam pemberdayaan merupakan fungsi dan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Peran ini bertujuan agar masyarakat memiliki daya, kekuatan, serta kemampuan dalam mengelola kehidupan secara berkelanjutan.²³ Dalam hal ini, peran pemberdayaan tidak hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi juga mencakup proses pembinaan, pendampingan, serta penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menghadapi berbagai permasalahan sosial.²⁴

²¹ Robert Chambers, *Rural Development: Putting the Last First* (London: Longman, 1983), 102.

²² Fahrudin, *Pemberdayaan, Partisipasi, Penguatan Kapasitas Masyarakat*.

²³ Suharto, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Dan Aplikasi*.

²⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Dan Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 77.

Adapun peran pemberdayaan sebagai berikut:²⁵

a. Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*)

Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan kelembagaan ikut membaik sehingga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

b. Perbaikan Usaha (*Better Business*)

Kelembagaan yang baik akan mendorong perbaikan usaha yang bermanfaat bagi anggota lembaga maupun masyarakat di sekitarnya.

c. Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)

Perbaikan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan seluruh anggota, termasuk masyarakat secara umum.

d. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)

Pendapatan yang membaik akan berdampak pada perbaikan lingkungan fisik dan sosial yang selama ini kerap terdampak oleh kemiskinan.

e. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)

²⁵ Afdhal Afriansyah et al., *Pemberdayaan Masyarakat* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 8–9.

Lingkungan dan pendapatan yang baik akan meningkatkan standar hidup yang dapat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

f. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)

Ketika setiap keluarga memiliki kehidupan yang baik, kehidupan masyarakat secara keseluruhan pun akan ikut lebih baik.

Jadi, peran pemberdayaan masyarakat bersifat menyeluruh dan saling berkaitan, mulai dari perbaikan kelembagaan hingga perbaikan kehidupan masyarakat secara luas, sehingga proses ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.

3. Teori Pemberdayaan Masyarakat dari Jim Ife

a. Konsep Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori pemberdayaan masyarakat yang digagas Jim Ife merupakan salah satu rujukan utama dalam kajian pengembangan masyarakat sejak akhir abad ke-20. Pemikiran Ife mulai dikembangkan secara sistematis melalui karyanya *Community Development Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice* pada tahun 1995. Karya tersebut kemudian diperluas dalam edisi berikutnya bersama Frank Tesoriero hingga tahun 2016. Latar belakang kemunculan teori

ini berakar pada keprihatinan terhadap praktik pembangunan yang bercorak *top-down* dan menempatkan masyarakat sebagai objek pasif.²⁶

Pemikiran Ife hadir untuk menggeser paradigma pembangunan ke arah yang lebih partisipatif. Sebagaimana dijelaskan Jim Ife dalam Tampongangoy, pemberdayaan bertujuan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politiknya melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.²⁷ Pandangan ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak bersifat *top-down*, melainkan proses partisipatif yang memberi ruang bagi masyarakat sebagai aktor utama pembangunan.²⁸ Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat pasif, tetapi sebagai pihak yang aktif menentukan arah hidupnya sendiri.

Dalam bangunan pemikiran Ife, konsep pemberdayaan dipahami melalui keterkaitan dua konsep dasar yaitu *power* atau daya dan *disadvantaged* atau ketimpangan. Jim Ife dalam Zubaedi menjelaskan bahwa ketidakberdayaan masyarakat muncul karena masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*) untuk menentukan arah hidupnya sendiri.²⁹ Hal serupa juga ditegaskan Jim Ife dalam Kartono bahwa pemberdayaan masyarakat selalu berangkat dari

²⁶ Afriansyah et al., *Pemberdayaan Masyarakat*.

²⁷ Deysi Livi Natalia Tampongangoy, *Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Kota Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2025), 3.

²⁸ Tampongangoy, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*.

²⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*.

adanya ketimpangan struktural antara kelompok yang berdaya dengan kelompok yang tidak berdaya.³⁰ Kondisi inilah yang menjadi titik pijak utama dalam setiap upaya pemberdayaan.

Secara definitif, Jim Ife dalam Zubaedi merumuskan bahwa *empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community*. Rumusan tersebut berarti pemberdayaan adalah upaya menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga agar kemampuan mereka dalam menentukan masa depan dan memengaruhi kehidupan komunitasnya semakin meningkat.³¹ Definisi serupa dikemukakan Jim Ife dan Tesoriero dalam Afriansyah dkk. bahwa pemberdayaan masyarakat ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan dan memengaruhi kehidupan kelompoknya.³² Pemberdayaan juga berarti memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu agar dapat menyelesaikan tugasnya secara kreatif dan mandiri sebagaimana ditegaskan Jim Ife dalam Irawan.³³

³⁰ Kartono, *Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*.

³¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*.

³² Afriansyah et al., *Pemberdayaan Masyarakat*.

³³ H Djoko Windu P Irawan, "Diktat Kuliah Pengembangan Bahan Pengajaran Mata Kuliah Pemberdayaan Masyarakat" (Magetan: Poltekkes Kemenkes Surabaya, 2022), 47.

Jadi, teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife pada dasarnya merupakan kerangka berpikir yang menekankan pengalihan kekuatan kepada masyarakat yang selama ini berada dalam posisi tidak berdaya. Inti teori ini terletak pada upaya mengatasi ketimpangan dengan cara memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat. Pemberdayaan bukan sekadar pemberian bantuan, melainkan sebuah proses partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menentukan masa depannya.

b. Perspektif Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memahami pemberdayaan secara utuh, Jim Ife membagi cara pandang terhadap pemberdayaan ke dalam empat perspektif utama. Keempat perspektif ini berfungsi sebagai sudut tinjau yang berbeda dalam melihat akar persoalan ketidakberdayaan dan strategi yang ditempuh untuk mengatasinya. Sebagaimana dijelaskan Jim Ife dalam Zubaedi, keempat perspektif tersebut adalah perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.³⁴ Penjabaran masing-masing perspektif diuraikan sebagai berikut.

³⁴ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*.

1) Perspektif Pluralis

Perspektif pluralis memandang pemberdayaan sebagai proses menolong individu dan kelompok yang kurang beruntung agar mampu bersaing secara efektif dengan kepentingan lain. Jim Ife dalam Widayanti menjelaskan bahwa pendekatan ini memaknai pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu *rule of the game* tertentu.³⁵ Upaya yang dilakukan mencakup pembelajaran, penggunaan keahlian melobi, pemanfaatan media yang berkaitan dengan tindakan politik, serta pemahaman tentang bagaimana sistem aturan main bekerja.³⁶

Dalam perspektif ini, kapasitas masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka dapat bersaing secara wajar tanpa ada pihak yang menang atau kalah. Jim Ife dalam Leppa dkk. menambahkan bahwa pencapaian pemberdayaan dalam perspektif pluralis ditentukan oleh tiga aspek utama yaitu pemberdayaan dengan pembelajaran, penggunaan keahlian melobi, dan pemahaman terhadap sistem atau aturan main.³⁷ Ketiga aspek

³⁵ Sri Widayanti, "Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan Teoritis," *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (January 2012): 98.

³⁶ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*.

³⁷ Josua De Fatima Leppa et al., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Tani (Studi Kasus Di Kelompok Tani Tnao Mat Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan)," *Jurnal Prodi PLS Universitas Nusa Cendana* 3, no. 2 (October 2023): 36.

tersebut menjadi indikator nyata dari proses pemberdayaan dalam kerangka pluralis.

Jadi, perspektif pluralis menekankan pemberdayaan sebagai upaya membekali masyarakat dengan kemampuan untuk bersaing secara setara dalam aturan permainan yang berlaku. Pendekatan ini memandang persoalan ketidakberdayaan dapat diatasi dengan peningkatan kapasitas individu dan kelompok dalam berkompetisi.

2) Perspektif Elitis

Perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk bergabung dan memengaruhi kalangan elite dalam masyarakat. Jim Ife dalam Zubaedi menjelaskan bahwa kalangan elite mencakup tokoh masyarakat, pejabat, dan orang kaya yang memiliki kekuatan dan kontrol kuat terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, dan parlemen.³⁸ Akibat dominasi tersebut, masyarakat awam menjadi tidak berdaya dalam berbagai aspek kehidupan.

Upaya pemberdayaan dalam perspektif ini dilakukan melalui pembentukan aliansi dengan kalangan elite, konfrontasi terhadap struktur elite, serta pengupayaan perubahan pada

³⁸ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*.

kalangan elite itu sendiri. Jim Ife dalam Widayanti menegaskan bahwa pemberdayaan elitis adalah upaya memengaruhi elite, membentuk aliansi dengan elite tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktik dan struktur yang elitis.³⁹ Aspek penting dalam perspektif ini adalah kemampuan masyarakat untuk bergabung, membentuk aliansi, dan memengaruhi kalangan elite agar berpihak pada kepentingan kelompok yang lebih lemah.⁴⁰

Jadi, perspektif elitis menempatkan pemberdayaan sebagai strategi mengubah relasi kekuasaan dengan cara menjalin hubungan strategis dengan kelompok dominan. Pendekatan ini menjadi penting karena banyak keputusan publik yang sangat dipengaruhi oleh kalangan elite.

3) Perspektif Strukturalis

Perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan untuk menghilangkan ketimpangan struktural yang menindas masyarakat. Jim Ife dalam Zubaedi menjelaskan bahwa masyarakat menjadi tidak berdaya karena adanya struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka, baik berdasarkan

³⁹ Widayanti, "Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan Teoritis."

⁴⁰ Leppa et al., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Tani (Studi Kasus Di Kelompok Tani Tnao Mat Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan)."

kelas sosial, gender, ras, maupun etnik.⁴¹ Oleh karena itu, pemberdayaan dimaknai sebagai proses pembebasan dan perubahan struktural yang bersifat fundamental.

Jim Ife dalam Widayanti menambahkan bahwa penganut strukturalis memaknai pemberdayaan sebagai upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktur atau sistem yang opresif.⁴² Dengan demikian, tujuan pemberdayaan hanya dapat tercapai apabila bentuk ketimpangan struktural berhasil dieliminasi. Aspek utama dalam perspektif ini adalah pengeliminasian ketimpangan struktural di tengah kelompok masyarakat sebagaimana dijelaskan Jim Ife dalam Leppa dkk.⁴³

Jadi, perspektif strukturalis menekankan pemberdayaan sebagai proses perubahan mendasar terhadap struktur sosial yang menindas. Pendekatan ini menempatkan persoalan ketidakberdayaan sebagai akibat dari sistem yang timpang, bukan sekadar persoalan individu.

c. Jenis Kekuatan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa ketidakberdayaan masyarakat muncul akibat masyarakat tidak

⁴¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*.

⁴² Widayanti, "Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan Teoritis."

⁴³ Leppa et al., "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Tani (Studi Kasus Di Kelompok Tani Tnao Mat Desa Mnelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan)."

memiliki kekuatan atau *powerless*. Untuk mengatasi kondisi ini, Jim Ife dalam Zubaedi mengidentifikasi enam jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka.⁴⁴ Keenam jenis kekuatan ini menjadi sumber daya internal yang dapat dikembangkan agar masyarakat mampu menentukan arah hidupnya sendiri.

1) Kekuatan atas Pilihan Pribadi

Kekuatan atas pilihan pribadi merujuk pada kemampuan setiap individu untuk menentukan jalan hidup yang lebih baik bagi dirinya sendiri. Jim Ife dalam Zubaedi menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan dalam aspek ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.⁴⁵ Kekuatan ini menjadi fondasi awal bagi tumbuhnya kemandirian individu dalam masyarakat.

2) Kekuatan dalam Menentukan Kebutuhannya Sendiri

Kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri merujuk pada kemampuan masyarakat untuk merumuskan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan tanpa harus didikte pihak luar. Jim Ife dalam Zubaedi menjelaskan bahwa pemberdayaan pada

⁴⁴ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*.

⁴⁵ Ibid.

aspek ini dilakukan dengan mendampingi masyarakat untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.⁴⁶ Pendampingan ini penting agar program pemberdayaan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

3) Kekuatan dalam Kebebasan Berekspresi

Kekuatan dalam kebebasan berekspresi merujuk pada kemampuan masyarakat untuk menyampaikan ide, pandangan, dan pengalaman secara bebas dalam ruang publik. Jim Ife dalam Zubaedi menegaskan bahwa pemberdayaan dilakukan dengan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.⁴⁷ Kebebasan berekspresi ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memperkuat identitas kolektifnya.

4) Kekuatan Kelembagaan

Kekuatan kelembagaan merujuk pada akses masyarakat terhadap berbagai lembaga sosial yang menopang kehidupan mereka. Jim Ife dalam Zubaedi menjelaskan bahwa pemberdayaan dalam aspek ini dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

pemerintahan, dan media.⁴⁸ Akses terhadap kelembagaan ini menjadi faktor penting bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dasar dan ruang partisipasi.

5) Kekuatan Sumber Daya Ekonomi

Kekuatan sumber daya ekonomi merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mengakses dan mengontrol kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya. Jim Ife dalam Zubaedi menegaskan bahwa pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol masyarakat terhadap aktivitas ekonomi.⁴⁹ Penguatan ekonomi ini menjadi syarat penting bagi terwujudnya kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.

6) Kekuatan dalam Kebebasan Reproduksi

Kekuatan dalam kebebasan reproduksi merujuk pada hak dan kemampuan masyarakat untuk menentukan proses reproduksi dalam kehidupannya. Jim Ife dalam Zubaedi menjelaskan bahwa pemberdayaan pada aspek ini dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi.⁵⁰ Kebebasan ini menempatkan masyarakat sebagai

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

subjek yang memiliki otoritas atas tubuh dan kehidupannya sendiri.

Jadi, keenam jenis kekuatan tersebut merupakan sumber daya internal yang dimiliki masyarakat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan pemberdayaan. Pemberdayaan yang efektif berarti menggali, menguatkan, dan memfasilitasi keenam kekuatan ini agar masyarakat mampu berdiri secara mandiri dan menentukan arah hidupnya.

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Selain menjelaskan perspektif dan jenis kekuatan, Jim Ife juga merumuskan strategi pemberdayaan yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Jim Ife dalam Hardiansyah, Nurwati, dan Taftazani menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan kelompok masyarakat dapat dilakukan melalui tiga strategi utama.⁵¹ Ketiga strategi ini saling melengkapi dan mencakup ranah kebijakan, gerakan sosial, serta pendidikan.

1) Pemberdayaan Melalui Perencanaan dan Kebijakan

Strategi pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan dilakukan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga agar mampu memberikan akses yang setara kepada masyarakat. Jim Ife dalam Hardiansyah, Nurwati, dan Taftazani

⁵¹ Hardiansyah, Nurwati, and Taftazani, "Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Desa Tarunajaya."

menegaskan bahwa strategi ini diarahkan untuk memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.⁵² Jim Ife dalam Kartono menambahkan bahwa strategi pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan menjadi tahap awal yang penting karena berkaitan dengan kerangka regulasi dan kelembagaan tempat masyarakat hidup.⁵³

2) Pemberdayaan Melalui Aksi Sosial dan Politik

Strategi pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik dilakukan melalui perjuangan politik dan gerakan sosial untuk membangun kekuasaan yang efektif. Jim Ife dalam Hardiansyah, Nurwati, dan Taftazani menjelaskan bahwa strategi ini menempatkan aksi sosial sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar masyarakat dalam tatanan kekuasaan.⁵⁴ Jim Ife dalam Kartono juga menegaskan bahwa pemberdayaan melalui aksi sosial menjadi cara untuk menyatukan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap persoalan yang mereka hadapi.⁵⁵

3) Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Pertumbuhan Kesadaran

⁵² Ibid.

⁵³ Kartono, *Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*.

⁵⁴ Hardiansyah, Nurwati, and Taftazani, "Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Desa Tarunajaya."

⁵⁵ Kartono, *Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*.

Strategi pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran dilakukan dengan proses pendidikan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat lapis bawah. Jim Ife dalam Hardiansyah, Nurwati, dan Taftazani menjelaskan bahwa strategi ini bertujuan meningkatkan kekuatan masyarakat melalui penyadaran terhadap berbagai aspek kehidupan yang luas.⁵⁶ Jim Ife dalam Kartono menambahkan bahwa pendidikan menjadi sarana utama untuk membangun kesadaran masyarakat dalam aspek yang luas, termasuk dalam isu sosial dan ekologis.⁵⁷

Jadi, ketiga strategi pemberdayaan Jim Ife tersebut memberikan kerangka tindakan yang menyeluruh, mulai dari ranah kebijakan, aksi kolektif, hingga pendidikan kesadaran. Ketiga strategi ini menjadi pedoman praktis dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat secara terarah dan berkelanjutan.

B. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1. Konsep PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

⁵⁶ Hardiansyah, Nurwati, and Taftazani, "Keberhasilan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Desa Tarunajaya."

⁵⁷ Kartono, *Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*.

melalui partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan. PKK berperan sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat dan keluarga, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial budaya.⁵⁸ PKK menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program yang terstruktur dan terarah.

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan PKK dapat membantu masyarakat, khususnya perempuan, untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian keluarga. Gerakan PKK adalah gerakan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui partisipasi masyarakat dengan melaksanakan sepuluh program pokok PKK yang menjadi pedoman dalam kegiatan kemasyarakatan.⁵⁹ Dengan demikian, PKK menjadi wadah yang strategis dalam mendorong peran aktif masyarakat demi terwujudnya keluarga yang sejahtera dan mandiri.

Jadi, PKK bukan sekadar organisasi perempuan biasa, melainkan sebuah gerakan nasional yang memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga di tingkat masyarakat terkecil, termasuk di tingkat lembang.

⁵⁸ Tim Penggerak PKK Pusat, *Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga*.

⁵⁹ Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2013), 1–3.

2. Tugas dan Tanggung Jawab PKK

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisa pemberdayaan, PKK memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup:⁶⁰

- a. Melaksanakan program pemberdayaan keluarga dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.
- b. Membina serta mengarahkan partisipasi masyarakat, khususnya bagi kaum Perempuan
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Keluarga
- d. Menanamkan nilai gotong royong terhadap kehidupan bermasyarakat.

Jadi, tugas dan tanggung jawab PKK bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek kehidupan keluarga, sehingga PKK memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun fondasi kesejahteraan masyarakat dari tingkat terkecil.

3. Tujuan PKK

Adapun tujuan dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. Mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mandiri
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

⁶⁰ Aminah, "Peran PKK Dalam Pelaksanaan Perempuan Di Desa."

⁶¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)*.

- c. Mengembangkan potensi keluarga dalam berbagai aspek kehidupan
- d. Mendukung pembangunan berbasis keluarga melalui program-program PKK

Jadi, tujuan PKK diarahkan pada terwujudnya keluarga yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga berdaya secara sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Struktur Organisasi PKK

Struktur organisasi PKK terdiri dari tingkat pusat hingga daerah, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa atau lembang. Pembagian kerja dilakukan melalui kelompok kerja (*Pokja*) sebagai berikut: ⁶²

- a. Tingkat pusat hingga daerah (nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa)
- b. Pembagian kerja melalui kelompok (Pokja)
 - 1) Pokja I (penghayatan Pancasila dan gotong royong)
 - 2) Pokja II (pendidikan dan keterampilan)
 - 3) Pokja III (pangan, sandang, dan perumahan)
 - 4) Pokja IV (kesehatan dan lingkungan).

Jadi, struktur organisasi PKK yang berjenjang dari pusat hingga desa/lembang dan terorganisir melalui pokja memungkinkan PKK untuk

⁶² Ibid.

menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara terstruktur dan terarah. Pada level paling konkret, struktur ini difungsionalkan melalui Dasawisma, yaitu unit-unit sepuluh keluarga berdekatan yang menjadi garis terdepan dalam operasionalisasi program pemberdayaan.⁶³ Dengan demikian, Dasawisma menjadi unit paling dekat dengan keluarga dan paling responsif terhadap kebutuhan lokal, memastikan bahwa setiap kegiatan pemberdayaan PKK mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga kegiatan sosial budaya seperti pelaksanaan *Rambu Solo'* di tingkat lembang dapat dijalankan dengan efektif dan relevan dengan konteks masyarakat setempat.⁶⁴

C. Budaya Toraja

1. Konsep Budaya Toraja

Budaya Toraja merupakan sistem nilai, norma, dan kepercayaan yang saling terhubung dan membentuk kehidupan komunitas secara menyeluruh. Kebudayaan ini tidak hanya dipahami sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai panduan hidup yang terus dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi.⁶⁵ Terdapat tiga unsur utama yang menjadi fondasi budaya Toraja, yaitu sistem kepercayaan, nilai dan norma, serta tradisi dan kebiasaan.

⁶³ Dahniar, "Peningkatan Kapasitas Dasawisma Kelurahan Bukit Timah Kota Dumai Melalui Pembukuan Keuangan Sederhana."

⁶⁴ Hilal et al., "Pemberdayaan Kelompok Dasawisma Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Desa Kotabumi Way Kanan."

⁶⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

a. Sistem Kepercayaan

Sistem kepercayaan adalah dasar yang utama dalam kehidupan manusia karna mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam, dan para leluhur. Dikalangan masyarakat Toraja, kepercayaan tradisional ini disebut dengan *Aluk Todolo*.⁶⁶ kepercayaan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian.

Aluk Todolo berisi norma-norma adat yang harus diikuti oleh masyarakat. Dalam kepercayaan ini, para leluhur memiliki peran yang sangat penting, sehingga berbagai ritual dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh.

b. Nilai dan Norma

Nilai dan norma dalam masyarakat Toraja muncul dari kepercayaan yang mereka anut. Nilai seperti kebersamaan kerja sama, dan saling menghargai sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Toraja. Norma ada juga memiliki peran yang signifikan dalam mengatur tindakan masyarakat. Setiap individu diharapkan

⁶⁶ Ibid.

menjalankan peranya sesuai dengan aturan yang sudah ada khususnya dalam kegiatan adat dan kehidupan sosial.⁶⁷

c. Tradisi dan Kebiasaan

Tradisi bentuk nyata dari kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dalam budaya Toraja, tradisi sangat di pertahankan dan dilaksanakan secara berkelanjutan dari turun-temurun. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara *rambu solo'* yang berfungsi sebagai penghormatan terakhir bagi mereka yang meninggal. Upacara ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat hubungan antara sosial dan masyarakat.

Selain tradisi, masyarakat Toraja juga memiliki berbagai kebiasaan sehari-hari yang mencerminkan nilai budaya yang mendalam. Kebiasaan ini termasuk kerja sama dalam membantu keluarga atau tetangga, keterlibatan dalam kegiatan adat serta sikap menghormati orang tua dan leluhur, kebiasaan ini di jalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat Toraja.⁶⁸

Budaya Toraja mengakar bahwa tata nilai, norma dan kepercayaan saling terhubung dan membentuk kehidupan komunitas.

⁶⁷ L. T. Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaanannya* (Tana Toraja: Yayasan Lepong Bulan, 1980).

⁶⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*.

Kepercayaan seperti *Aluk Todolo* menjadi dasar dalam menciptakan nilai dan norma, dan kemudian terwujud dalam tradisi seperti *rambu solo'* dan keberadaan *Tongkonan*. Oleh sebab itu, budaya Toraja tidak hanya berfokus sebagai leluhur, tetapi juga sebagai panduan hidup yang terus di pelihara dan di lestarikan oleh masyarakat.

2. *Rambu Solo'*

Rambu Solo' merupakan upacara adat pemakaman yang menjadi salah satu tradisi paling penting dalam kehidupan masyarakat Toraja. Upacara ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi orang yang telah meninggal serta untuk mengantarkan arwahnya menuju alam roh yang disebut *Puya*.⁶⁹ Dalam kepercayaan *Aluk Todolo*, kematian tidak dianggap sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai tahapan perpindahan menuju kehidupan di alam roh. Sebelum prosesi ritual dilaksanakan, orang yang telah meninggal masih dianggap dalam kondisi "sakit" dan belum sepenuhnya meninggal.⁷⁰

Rambu Solo' tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mempererat solidaritas sosial dan menjaga hubungan antara anggota masyarakat.⁷¹ Upacara ini melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar sebagai bentuk solidaritas dan

⁶⁹ Y A Sarira, *Aluk Rambu Solo' Dan Prosesi Orang Kristen Tentang Rambu Solo* (Rantepao: Pusbang Gereja Toraja, 1996), 32.

⁷⁰ Waterson, *The Living House: An Anthropology of Architecture in South-East Asia*.

⁷¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*.

penghormatan kepada orang yang meninggal. Selain itu, pelaksanaan *Rambu Solo'* juga berkaitan dengan stratifikasi sosial masyarakat Toraja yang dikenal dengan empat tingkatan, yaitu *Tana' Bulaan* (bangsawan tinggi), *Tana' Bassi* (bangsawan menengah), *Tana' Karurung* (rakyat biasa), dan *Tana' Kua-Kua* (golongan hamba), sehingga bentuk dan skala upacara disesuaikan dengan strata sosial keluarga yang melaksanakannya.⁷²

Jadi, *Rambu Solo'* merupakan peristiwa sosial-budaya yang memiliki makna religius, sosial, dan komunal sekaligus, sehingga pelaksanaannya membutuhkan koordinasi yang baik dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti PKK.

3. Tahapan Pelaksanaan *Rambu Solo'*

Pelaksanaan *Rambu Solo'* terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.⁷³

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan *sirampun*, yaitu pertemuan atau rapat keluarga sebagai bentuk musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai rencana pelaksanaan upacara. Kegiatan ini dipandu oleh tokoh adat dan dihadiri oleh tokoh agama, kepala desa, serta *pa'tondokan* (kelompok masyarakat). Dalam

⁷² Lumbaa, Mukramin, and Damayanti, "Kearifan Budaya Lokal Dalam Ritual Rambu Solo' Di Toraja."

⁷³ Pabebang, Erikson, and Subambang, "Tinjauan Teologis Mengenai Upacara Rambu Solo'."

pertemuan ini dibahas bentuk pelaksanaan upacara, syarat yang harus dipersiapkan, dan dibentuk panitia pelaksana sebagai perpanjangan tangan keluarga.⁷⁴

b. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan terdapat dua rangkaian kegiatan utama. Pertama, kegiatan *manglelleng*, yaitu penebangan bambu dan kayu untuk kebutuhan pemondokan yang dilakukan secara gotong royong oleh seluruh *pa'tondokan*. Kedua, kegiatan *melantang*, yaitu pembangunan pondok-pondok upacara yang terdiri dari pondok tamu (*lantang karampoan*), pondok keluarga (*lantang keluarga*), dan dapur umum. Selain itu, disiapkan pula berbagai perlengkapan upacara seperti *lakkian*, *saringan*, *tombi*, *lamba-lamba*, dan berbagai ornamen adat.⁷⁵

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa rangkaian prosesi yang berurutan, yaitu:⁷⁶

1) *Ma'pasa' tedong*

Prosesi mengarak dan mengumpulkan seluruh kerbau yang akan dikurbankan ke pelataran upacara.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

2) *Ma'karu'dusan*

Prosesi mengangkat jenazah dari kamar persemayaman ke ruang tengah *tongkonan* sebagai tanda jenazah resmi dinyatakan meninggal.

3) *Mangriu' batu*

Prosesi menarik dan menanam batu prasasti di lokasi upacara secara gotong royong.

4) *Mellao alang*

Prosesi menurunkan jenazah dari *tongkonan* menuju *alang* (lambung).

5) *Ma'pasonglo'*

Prosesi pengarakan jenazah mengelilingi kampung sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa upacara siap dimulai.

6) *Ma'pasilaga tedong*

Prosesi adu kerbau yang menjadi hiburan bagi masyarakat dan tamu yang hadir.

7) *Allo datu*

Prosesi penerimaan tamu dan kerabat yang datang melayat secara adat, disertai pencatatan bawaan tamu. Pada tahap inilah

kelompok ibu-ibu PKK turut mengambil peran dengan menyajikan hidangan bagi para tamu.⁷⁷

8) *Mantunu*

Puncak upacara berupa penyembelihan kerbau dan babi yang dagingnya dibagikan secara adat kepada keluarga dan kerabat sesuai peruntukannya.

9) *Ma'kaburu'*

Prosesi pemakaman jenazah di *liang* (kuburan batu) sebagai rangkaian akhir dari seluruh upacara.

Jadi, pelaksanaan *Rambu Solo'* merupakan rangkaian prosesi yang panjang, terstruktur, dan sarat makna, yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara aktif, di mana PKK memiliki ruang untuk turut berperan, khususnya dalam mendampingi keluarga dan menyukseskan kegiatan penerimaan tamu serta kegiatan sosial lainnya dalam upacara tersebut.

⁷⁷ Ibid.